

DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

Gulirkan Program Unggulan, Berdayakan Penyandang Disabilitas



Anggota Difabel Zone di Triharjo, Pandak sedang beraktivitas membuatik

KR - Sukro Riyadi



Pelatihan Keterampilan Budidaya dan Olahan Jamur Tiram di Kalurahan Tirrenggo

KR - Istineva

BANTUL (KR) - Banyak program unggulan sudah digulirkan Pemerintah Kabupaten Bantul terkait dengan pemberdayaan penyandang disabilitas. Bersama pemerintah kalurahan, kapanewon, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul serta Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul. Dinas Sosial Bantul sebagai leading sektor dalam program pemberdayaan penyandang disabilitas tersebut terus membuat terobosan baru. Hal ini perlu dilakukan mengingat difabel di Bantul mencapai 6.000 lebih tersebar di 17 kapanewon, 75 kalurahan di Kabupaten Bantul.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Gunawan Budi Santoso S.Sos, M.H., didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tatik Windari S.Sos., M.S.E., mengungkapkan, berharap seperti tahun sebelumnya, tahun 2025 mendatang pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul tetap digulirkan. "Tahun 2025 mendatang, kami berharap untuk pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul yang diampu oleh Dinas Sosial ini tetap eksis. Kita tentu akan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, lintas OPD maupun dengan pemangku kepentingan di wilayah," ujar Gunawan.

Artinya kata Gunawan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan program untuk difabel tersebut. Membutuhkan partner dalam pemberdayaan disabilitas ini, baik sebelum program berjalan maupun setelah kegiatan pemberdayaan selesai. Sehingga dari dinas terkait maupun dunia usaha bisa memberikan ruang kepada penyandang disabilitas untuk bisa berdaya dan mampu melakukan kegiatan ekonomi seperti masyarakat lainnya. Selama ini Dinas Sosial

Bantul terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul maupun Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul. Sinergitas tersebut mutlak dilakukan dalam upaya "menawarkan" dan penempatan penyandang disabilitas terampil dengan harapan lebih cepat terserap di dunia kerja.

Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas ini membutuhkan identifikasi potensi dan pangsa pasar produk yang bernilai ekonomi. Untuk itu diperlukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah.

"Pemerintah kalurahan itu yang secara detail memahami potensi dan kebutuhan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk penyandang disabilitas di wilayahnya. Contoh disatu kalurahan kemarin kita sudah mengadakan pelatihan budidaya jamur tiram. Dan kita hadirkan narasumber bagaimana cara budidaya, kemudian bagaimana cara pengolahan," ujar Gunawan.

Sedang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tatik Windari menambahkan, sejauh ini salah satu konsen dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul ialah pem-

berdayaan penyandang kaum disabilitas. "Kami dari Dinsos Bantul konsen terhadap pemberdayaan penyandang disabilitas. Tentu dengan menyesuaikan kebutuhan mereka. Bahkan tahun lalu kita juga mengadakan pelatihan budidaya madu lanceng dan pelatihan massage juga selain budidaya jamur tiram," ujar Tatik.

Selain itu, sebelum program dijalankan, dilakukan floating jenis keterampilannya. Dinas Sosial berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah. "Pak lurah bu Lurah, pak Panewu bu Panewu secara personal paham terkait dengan kebutuhan teman-teman disabilitas. Jangan sampai pemerintah salah dalam memberikan program pemberdayaan. Terbaru ada program pelatihan membuat digulirkan. Kegiatan produktif tersebut dijalankan dengan pendampingan dari dokter juga. "Maksudnya, karena pesertanya dari teman-teman penyandang disabilitas mental, maka saran dokter menjadi penting untuk memilih peserta yang sudah bisa menerima pelatihan, sudah bisa duduk tenang untuk mendengarkan instruksi dari instruktur," jelasnya.

Terkait dengan kategori penyandang disabilitas dimungkinkan menjadi peserta pelatihan. Selama ini Dinas Sosial Kabupaten menggunakan acuan difabel yang masih usia produktif. "Dalam kegiatan pemberdayaan tersebut, acuan kita diantaranya usia masih produktif. Dan penyandang disabilitas yang bisa mengikuti pemberdayaan ini, misalnya pelatihan budidaya jamur tiram. Yang memungkinkan adalah untuk pe-

nyandang disabilitas fisik tertentu dan rungu wicara. Kemudian penyandang disabilitas mental juga masih memungkinkan sepanjang dia terkonkondisi dengan baik," ujar Tatik.

Dari Dinas Sosial Bantul juga melakukan program pendampingan lanjutan paska diberikan keterampilan. "Kalau biasanya terus kita komunikasikan dengan teman-teman Disnakertrans kebetulan di sana ada unit layanan disabilitas bidang Ketenagakerjaan. Sehingga kami biasanya mengupdate ke mereka. Ini Kami mempunyai sumber daya manusia dari kelompok disabilitas yang barangkali ada perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dari penyandang disabilitas dengan spek keterampilan tertentu ini begitu biasanya kita dalam menjalin komunikasi," jelasnya.

Selain Disnakertrans, Dinsos Kabupaten Bantul, juga kerap berkolaborasi dengan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul Dinas Koperasi. Karena di Dinas KUKMP juga melakukan pembinaan terhadap UMKM. "Bisa jadi Dinas UMKM itu membutuhkan tenaga dari teman-teman disabilitas yang memungkinkan untuk ikut berproduksi di UMKM," jelas Tatik.

Terkait kategori penyandang disabilitas yang bisa diberdayakan dan diberi bekal keterampilan. Menurutnya penyandang disabilitas fisik dengan kondisi tertentu lebih diutamakan. Sebagai contoh, disabilitas kaki, tetapi tangannya masih bisa untuk beraktivitas. Sehingga masih memungkinkan untuk dibekali keterampilan. Selain itu tunarungu, wicara juga bisa, ten-

tu dengan instruksi tertentu atau dengan bahasa isyarat. "Jadi saya pikir itu juga masih memungkinkan termasuk disabilitas mental yang sudah terkonkondisi saya pikir masih bisa juga," kata Tatik.

Pasca pendampingan, biasanya diarahkan untuk membangun sinergitas dan berkolaborasi dengan UMKM di sekitarnya. "Bahkan ketika kemarin di Bantul Kreatif Expo di Gabusan kita berikan space khusus untuk teman-teman penyandang disabilitas yang berproduksi baik itu kerajinan maupun makanan dan lain sebagainya," jelasnya.

Selain itu dari Dinsos memantau pergerakan pemasaran dari produk disabilitas. Karena ada di beberapa sentra gitu, ada di Imogiri, teman-teman disabilitas begitu berdaya. Artinya dengan keterbatasan yang ada, mereka berupaya untuk bisa menembus ataupun sama setara dengan yang lainnya. Meskipun pemberdayaan penyandang disabilitas sudah dilakukan beberapa tahun, masih menemui beberapa kendala, antara lain kendala dilapangan ialah, tidak mudah dan butuh waktu merangkul difabel. Teman-teman difabel korban gempa 2006 membutuhkan pendekatan dan penguatan mental yg membutuhkan waktu. Karena sebelum gempa mereka adalah orang normal yang beraktivitas serba bisa. Tiba-tiba dalam waktu satu menit saat gempa 2006, teman-teman ini menjadi difabel. "Selain menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya, kita selalu dan selalu memberikan motivasi bahwa kita harus bangkit. Yang seperti itu tidak mudah memang. Tapi teman-teman bisa

membuktikan, bisa mengajak dan ada buktinya," katanya.

Sedang program kerja tahun 2025, masih sama, dengan beberapa nanti pengembangan-pengembangan tertentu. Tetapi pihaknya akan melihat trendnya ke depan itu seperti apa.

Terkait support anggaran dari pemerintah memang sudah bagus. Meski ada kekurangan untuk pendukung kegiatan dan program. Hal tersebut dikomunikasikan dengan pemangku kepentingan di wilayah. "Kita tidak bisa sendiri, karena bagaimana Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Pene- wu itu menjadi orang kunci yang memang mampu di wilayah. Jadi konsolidasi dengan Bapak, Ibu di wilayah untuk merumuskan apa baiknya, bagaimana sebagainya. Kemudian tugas kami adalah sepanjang kami memandang apa yang mereka aspirasikan itu menjadi sesuatu yang bisa kita usulkan. Tugas kami untuk memfasilitasi mereka mengusulkan ke bapak-bapak di tim anggaran pemerintah daerah. Kalau support dari pemerintah daerah berupa anggarannya sudah memenuhi. Menurut saya sudah, tapi mungkin perlu ditingkatkan untuk mendukung program pemberdayaan kaum difabel. Produk mereka juga butuh packaging yang bagus, produk makanan misalnya. Selama ini pelatihan packaging belum banyak menyentuh ke teman-teman disabilitas. Jadi saya berharap di tahun depan ada pelatihan lanjutan dari pelatihan yang sudah kita laksanakan. Selama ini lebih ke produksi dan pemasaran, unguin kedepannya lebih ke packaging dari produknya agar mempunyai nilai plus," ujar Tatik. (Roy)



Pelatihan Pijat bagi Penyandang Disabilitas di Waroeng Omah Sawah, Bantul.

KR - Istineva



Seorang pengunjung di Difabel Zone di Triharjo, Pandak menunjukkan produk karya difabel.

KR - Sukro Riyadi

HADAPI PILKADA 2024

Muhammadiyah Teguh Pada Khittah Perjuangan

BANTUL (KR) - Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul merasa perlu untuk menyampaikan sikap sehubungan dengan posisi dan peran Muhammadiyah di dalam dinamika berbangsa dan bernegara, khususnya dalam konteks Pilkada 2024 atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, dengan

menyampaikan maklumat bagi seluruh warga masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah di Kabupaten Bantul.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Bantul, H Rikusawan Qomara SE didampingi jajarannya, pada penyampaian pernyataan sikap PDM Bantul

dalam Pilkada 2024 di Gedung PDM Bantul, Kamis (26/9).

Isi Pernyataan Pers tersebut sebagai berikut Persyarikatan Muhammadiyah bersikap tegak-lurus berteguh pada Khittah Perjuangan Muhammadiyah yang mengamalkan ke-pada segenap jajarannya berserta seluruh Orga-

nisasi Otonomnya agar secara kelembagaan tidak terlibat langsung dalam kegiatan politik praktis, namun Muhammadiyah tetap berkewajiban mendorong proses politik damai dan berkeadaban yang tercermin dalam pelaksanaan Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan

tetap menjaga kerukunan dan perdamaian.

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bantul mendorong peran dan partisipasi warga Muhammadiyah dalam Pilkada 2024 berdasarkan pandangan, peranan para kader dan warga Muhammadiyah dalam Pilkada merupakan hak politik pribadi

atau kelompok warga Muhammadiyah yang dijamin oleh Undang-Undang sehingga harus dihargai dan dijunjung tinggi, dan dijalankan dengan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara selaras dengan kepentingan Muhammadiyah, di atas kepentingan pribadi atau golongan. (Jdm)-f